

**UPAYA PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
(Studi Kasus Upaya Pelaksanaan Akuntabilitas, Transparansi, dan
Partisipasi di Pemko Sawahlunto Periode 2003-2008)**

SKRIPSI

Oleh:

**NOVENDRA HIDAYAT
BP. 04193056**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

ABSTRAK

Novendra Hidayat. Skripsi S1. Upaya Pelaksanaan *Good Governance* Pada Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2003-2008. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 101 Hlm, 14 Buku, 2 Skripsi, 2 Laporan, 4 Website, dan 3 Berita Surat Kabar.

Terwujudnya masyarakat madani yang memiliki nilai-nilai *good governance* merupakan fokus utama reformasi di Indonesia. Menyadari kenyataan demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto pada Januari 2000 sebelum dicanangkannya otonomi daerah mengikuti program BUILD-UNDP sebagai upaya membangun *good governance* di Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto tergabung dalam 9 (sembilan) Kota yang menjadi *pilot project* (proyek percontohan) pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Kota Sawahlunto, Kota Metro Lampung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Solo, Kota Probolinggo, Kota Mataram, Kota Kendari, dan Kota Gorontalo. Ketika itu Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen merubah tata pemerintahannya ke arah yang lebih baik. Terjadinya suksesi kepemimpinan melalui Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto pada Juni 2003 memberikan suatu harapan dalam keberlanjutan penerapan prinsip *good governance* di Kota Sawahlunto. Namun kontras dengan yang ditemukan pada Pemko Sawahlunto 2003-2008 yang mengindikasikan kurang terlaksananya dengan baik *good governance* di Kota Sawahlunto. Sehingga yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "***Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2003-2008 Dalam Melaksanakan Good Governance di Kota Sawahlunto?***

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2003-2008. Pada penelitian ini, menggunakan konsep *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desan penelitian studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Triangulasi data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Informan dipilih secara *purposive sampling*.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pada akuntabilitas, ketersediaan sistem informasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja Pemerintah dengan LAKIP dan LKPJ, dan meminta akuntan publik melaksanakan audit terhadap program atau kegiatan tertentu. Transparansi, *public hearing* terhadap setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum, publikasi setiap prosedur pelayanan, pusat pesan layanan singkat (*SMS Centre*), dan pertemuan berkala antara Pemko dengan *stakeholders*. Partisipasi, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota, menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan membentuk Fasilitator Pembangunan Kota (*Fasbangkot*).

Kata kunci penelitian : Upaya, Pemerintah, *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fokus utama reformasi di Indonesia adalah terwujudnya suatu masyarakat madani dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat, dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang memunculkan nilai demokrasi, keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab kepada rakyat.¹

Ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, dampak positif dari reformasi ini telah terjadi pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sistem yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik. Harus diakui selama ini sistem pemerintahan yang dijalankan masih sangat sentralistis. Sistem seperti ini jelas memberikan peluang yang sangat besar kepada pusat untuk melakukan intervensi pada hampir semua dimensi kehidupan. Sistem seperti ini juga telah menciptakan dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah dan dominasi pemerintah atas masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, pola pemerintahan sentralistis yang dijalankan selama ini telah menghambat proses belajar sekaligus menumpulkan inisiatif dan kreatifitas dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Daerah dikondisikan untuk "belajar tidak berdaya" karena ketergantungan yang sangat

¹ E.Koswara, *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*. Makalah dipersiapkan Untuk Bahan Pembahasan Dalam Seminar/Diskusi Pada Instansi/Lembaga/Badan di Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1999, hlm. 1.

tinggi pada pemerintah pusat. Dalam iklim ketergantungan itulah pemerintah daerah dijadikan alat untuk melayani kepentingan pusat di daerah. Dengan pergeseran paradigma pemerintahan ini telah memberikan keluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Dampak positif inilah yang melahirkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya kedua Undang-Undang ini dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanaan Undang-Undang ini diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintahan daerah yang dapat mewujudkan *good governance* dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Dalam paradigma baru pemerintahan, pemerintah bukanlah penguasa, tetapi pemerintah adalah eksekutor atau pelaksana, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang telah disepakati secara bersama-sama dengan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan rakyat adalah pengembalian amanat rakyat, karena rakyatlah konstituennya. Karena itu, baik rakyat secara langsung maupun rakyat melalui wakil-wakilnya mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dengan memberi keterangan, penjelasan dan jawaban terhadap berbagai kebijaksanaan dalam melaksanakan mandat yang diterima. Dengan demikian pertanggungjawaban pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2003 - 2008 dalam melaksanakan *good governance* di Kota Sawahlunto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto terus berupaya melaksanakan prinsip *good governance* di pemerintahannya agar lebih baik lagi.

Dalam upaya melaksanakan prinsip *good governance* tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan berbagai kegiatan. Diantara upaya Pemko Sawahlunto dalam melaksanakan prinsip *good governance* dapat dilihat pada tiga prinsip pokok pelaksanaan *good governance*, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Pada prinsip akuntabilitas, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dengan ketersediaan sistem informasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja Pemerintah Kota Sawahlunto dengan menggunakan sistem LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang mengacu kepada

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Jakarta: Bappenas.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3 Malang.
- J. Moleong, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- John W. Cresswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta, KIK Press, hlm. 141.
- J.S. Edralin. 2000. *Pengembangan Kemampuan Pemerintahan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Depdagri Otonomi Daerah dan Bappenas.
- Koswara.E. 1999. *Bahan Pembahasan Dalam Seminar Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- K. Yin, Robert. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.